

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Tiongkok menjadi sorotan publik karena isu kemanusiaan, terorisme, ekstremisme, dan separatisme yang terjadi pada salah etnis minoritas, yakni Uyghur di provinsi Xinjiang. Xinjiang adalah salah satu provinsi di Tiongkok bagian bagian barat laut. Pada mulanya, Xinjiang merupakan wilayah yang terletak di pedalaman benua Eurasia yang berbatasan dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Mongolia, Tibet, serta India. Dengan letak strategis ini, Xinjiang ialah wilayah objek para pedagang Tiongkok. Selama beratus – ratus tahun, wilayah strategis yang disebut juga sebagai jalur sutra oleh Tiongkok ini seiring dengan berjalannya waktu menjadi wilayah kedaulatan dinasti Qing hingga akhirnya menjadi wilayah otonom Republik Rakyat Tiongkok yang diintegrasikan sejak 1955 (Alptekin, 2008 dalam Wardhani, 2011). Proses integrasi ini dilakukan dengan adanya *peaceful liberation* sebagai bentuk pemerintah Tiongkok yang memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Uyghur ialah sebuah etnis minoritas di Tiongkok yang merupakan keturunan etnis keturunan peradaban Turki, yakni Kazaks Uyghur, Kirgiz, Tatar dan Uzbek. Etnis ini berbahasa Turki dengan mayoritas agama Islam. Uyghur juga dikenal sebagai etnis dengan populasi terbanyak yang tinggal di wilayah Provinsi Xinjiang sebelum adanya migrasi etnis Han di wilayah tersebut (Wardhani, 2011). Dari tahun diintegrasikannya wilayah Xinjiang ke dalam wilayah Tiongkok hingga kini, masalah struktural yang belum mencapai solusi ini ialah adanya upaya separatis oleh etnis Uyghur karena benturan kebudayaan sehingga menghasilkan kesukarannya beradaptasi dengan bangsa Han terutama dalam hal keyakinan, serta merasa bangsa Han sebagai etnis mayoritas Tiongkok terus bermigrasi ke tempat tersebut untuk mengeksploitasi wilayah tersebut (Wardhani, 2011).

Perlu diketahui, permasalahan struktural yang ada di Uyghur sebelumnya konon diperparah karena adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis di wilayah Xinjiang ini. Isu ini kian memanas dan mengundang kecaman dari berbagai kalangan di dunia, hal ini terlihat ketika media mulai menyuarakan hasil wawancara

serta pengakuan para eks-tahanan di Kamp tersebut dan apa yang terjadi disana, salah satunya British Broadcasting Corporation (BBC). Bristow dari BBC News (2018) menjabarkan tentang mantan tahanan kamp tersebut berbicara bahwa telah terjadi penyiksaan secara fisik dan psikologis. Pada Juli 2018 silam, mantan guru dari salah satu kamp melarikan diri ke Kazakhstan dan berkata pada pengadilan setempat bahwa apa yang disebut oleh Tiongkok sebagai Kamp Reeducasi ialah penjara di pegunungan. Secara sederhana isu kemanusiaan ini masih dipertanyakan karena terdapat dua informasi berbeda yang dibagikan oleh media massa global. Kedua hal berbeda tersebut dapat ditelusuri melalui media Tiongkok, salah satunya China Daily dan BBC News serta media barat lainnya. Dilansir melalui China Daily (2018), media Tiongkok ini pada September 2018 memberi pernyataan dalam artikel yang berjudul “*Reality of Xinjiang different from that Potrayed by West: China Daily Editorial*”. Dalam editorial tersebut dijabarkan bahwa pada dasarnya terdapat dua pandangan mengenai masalah yang terjadi pada Uyghur di daerah Xinjiang, pertama yakni premis yang diberikan oleh Tiongkok, dan kedua, yang digambarkan oleh media Barat. Pandangan pertama, premis yang dilansir melalui China Daily (2018) ialah Tiongkok sedang melakukan kamp vokasional dengan alasan bahwa banyak Muslim muda terutama di empat daerah kurang berkembang di bagian selatan wilayah tersebut kurang mendapatkan pendidikan dan keterampilan sehingga membuat mereka rentan terhadap propaganda ekstrimis yang dipromosikan dari luar negeri. Pandangan kedua ini dapat disebut sebagai tuduhan yang dibuat media Barat untuk mencoreng pemerintah Tiongkok. Tuduhan tersebut memang bukan merupakan hal yang baru bahkan sudah menjadi praktik rutin bagi Barat untuk menggambarkan sistem otoriter yang bertolak belakang dengan sistem kebebasan rakyat.

Pada dasarnya keberadaan kedua berita tersebut dapat membuat kebingungan di antara masyarakat internasional. Secara normatif, Tiongkok sebagai negara berdaulat mempunyai otonomi atas wilayahnya sendiri juga berhak menyuarakan tentang apa yang terjadi di wilayahnya, melalui media resmi pemerintahnya. Namun, pada isu HAM Uyghur ini, masyarakat internasional justru dibanjiri dengan media-media massa global seperti CNN, New York Times, dan BBC yang

gencar memberitakan isu ini yang mulai menimbulkan skeptisisme masyarakat Internasional bahkan masyarakat Tiongkok itu sendiri. Hal tersebut diperlihatkan seperti contoh yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni media China Daily yang disokong oleh pemerintah Tiongkok berusaha memvalidasi warga negaranya mengenai isu yang terjadi di Xinjiang. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada era informasi kini, masyarakat semakin gencar dan mudah mengakses informasi. Media massa pada lingkup global telah mentransformasikan informasi sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat secara lintas batas, baik masalah umum maupun elit politik suatu negara. Seperti yang dijabarkan oleh Coban (2016), proses media menyediakan informasi pada saat yang bersamaan mengedukasi masyarakat proses tentang dunia, sehingga pengaruh media massa dalam hubungan internasional ialah menggambarkan citra aktor-aktor internasional baik negara ataupun non-negara.

Adanya pemberitaan isu HAM Uyghur secara serupa tapi tak sama oleh media massa global yang diketahui memang didominasi oleh media massa ‘Barat’ menjadi menarik karena masyarakat informasi kini mulai kritis memilah-milih berita yang dibaca. Apabila sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai teori CNN Effect, maka pada penelitian ini, penulis ingin berfokus pada media massa global BBC sebagai media massa global dengan pengikut terbanyak di Facebook dan memiliki dengan 376 juta audiensi pada 2018, dan terus menaik hingga 426 juta audiensi pada 2019 yang diukur oleh The Global Audience Measure (2019). Peran media massa BBC semakin vital ketika isu HAM Uyghur yang pada mulanya selalu melansir melalui media massa pemerintah Tiongkok hingga 2014, berubah secara independen bahkan mengirim jurnalis untuk terjun langsung ke Xinjiang pada awal 2015. Secara singkat, lini masa pemberitaan BBC mengenai isu HAM etnis Uyghur di Xinjiang dimulai pada 30 April 2014 mengenai asal-usul masyarakat etnis Uyghur dengan judul “ Who is Uyghur ?” (BBC News, 2014a). Pemberitaan tersebut dilanjutkan oleh pemberitaan hukuman mati bagi dua orang dari tiga belas tersangka yang diduga teroris pada Tiananmen Crash di Pengadilan Xinjiang (BBC News, 2014b). Pada penghujung tahun, tepatnya 11 Desember 2014, BBC News mempublikasikan berita mengenai pelarangan menggunakan kerudung di Kota

Ürümqi, Xinjiang yang juga dilansir dari media pemerintah Tiongkok (BBC News 2014c). Hampir selama 2014, pemberitaan mengenai etnis Uyghur masih sebatas pemberitaan yang dilansir BBC News dari media pemerintah Tiongkok. Kecurigaan BBC News terhadap apa yang terjadi pada masyarakat Uyghur di Xinjiang ini menjadi dasar media massa ini tidak lagi melansir media pemerintah Tiongkok dan mengirim tim jurnalis khusus ke Xinjiang. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan pada 2 Januari 2015. Pada waktu tersebut, BBC News membahas permasalahan di Uyghur yang mengkritik efektivitas pemerintah Tiongkok dalam memerangi dugaan ekstremisme agama Islam dan upaya separatis di wilayah tersebut dalam judulnya “Xinjiang: Has China’s crackdown on ‘terrorism’ worked?” sebagai bentuk laporan kunjungan jurnalis BBC News, Carrie Gracie (BBC News, 2015). Seiring dengan berjalannya waktu, pemberitaan mengenai etnis Uyghur di Xinjiang ini masih berlanjut hingga 2019 yang semakin intens juga independen serta fokus kepada pencarian data sebagai bukti valid berita.

Pemberitaan BBC sebagai media massa global mengenai isu HAM etnis Uyghur di Xinjiang ini telah menyebabkan adanya perubahan citra Tiongkok dalam masyarakat di panggung internasional. Hal ini dilihat dari intensitas pemberitaan mengenai isu ini dan pelansiran berita yang dilakukan oleh mayoritas negara dengan populasi terbanyak di dunia yang jabarkan berdasarkan The Global Audience Measure (2018). Secara lebih spesifik, terdapat sepuluh negara audiensi BBC terbesar di luar Inggris, yakni India, Nigeria, Amerika Serikat, Kenya, Afghanistan, Bangladesh, Mesir, Iran, Tanzania, dan Pakistan (The Global Audience Measure, 2019). Dengan audiensi BBC sebanyak itu, pemberitaan mengenai Uyghur akan berdampak pada citra internasional Tiongkok dengan adanya opini publik yang terbentuk, terlebih, BBC selalu memberi penekanan dalam pemberitaan Uyghur yang terlihat condong ke arah pelanggaran HAM serta pembelaan terhadap diskriminasi agama Islam sebagai agama mayoritas etnis Uyghur. Hal tersebut lebih jelas dengan fokus pada kata-kata tertentu seperti “kamp”, “muslim”, “China’s Muslim” dan “Uighur’s Muslim” dalam berita Uyghur. Upaya-upaya tersebut akan penulis analisis lebih dalam untuk mengetahui

tujuan serta arah BBC dalam membentuk citra Tiongkok di panggung internasional melalui isu Uyghur ini.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya BBC mempengaruhi citra internasional Tiongkok dalam isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat etnis Uyghur?

1.3. Tujuan Penelitian

Skripsi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana media massa global BBC mempengaruhi citra internasional Tiongkok dengan pemberitaan mengenai isu HAM kelompok minoritas Uyghur. Pemberitaan BBC mengenai isu HAM Uyghur yang pada mulanya hanya mengutip media pemerintah Tiongkok berubah menjadi sangat intens bahkan mengirim koresponden ke tempat kejadian perkara. BBC terkait isu ini juga selalu fokus pada hal – hal tertentu dilihat dari intensitas dan pengulangan kata setiap judul berita. Penelitian ini berusaha memperlihatkan BBC sebagai media massa global yang independen dengan audiensi berjumlah ratusan juta di berbagai belahan dunia mampu menggiring opini dan membentuk citra internasional.

1.4. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, untuk dapat memahami letak permasalahan dan fokus penelitian, terdapat beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai dasar acuan penulis untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang telah dijabarkan. Beberapa acuan pemikiran tersebut yakni:

1.4.1. HAM berdasarkan Universal Declaration of Human Rights

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ialah dokumen penting dalam sejarah HAM yang disusun oleh para wakil dengan latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari seluruh dunia (United Nations, t.t.) . Deklarasi ini diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 yang merupakan

cerminan setelah Perang Dunia Kedua dan sebagai standar capaian umum bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini merupakan bentuk resolusi 217 PBB yang di tanda tangani di Paris, Perancis. Deklarasi ini juga merupakan deklarasi pertama yang melindungi HAM secara fundamental dan universal (United Nations, t.t.). Terlebih, Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu dari 48 negara yang memberikan suara pada deklarasi ini. Dalam pembukaan UDHR, disebutkan bahwa hak dan martabat tidak dapat dicabut oleh siapa pun meliputi dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Selain itu, deklarasi ini juga memuat penekanan terhadap HAM yang perlu dilindungi oleh hukum juga pengembangan hubungan persahabatan antar negara. Ditegaskan pula dalam UDHR bahwa negara anggota perlu diperjuangkan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak kebebasan ini dengan langkah progresif, dalam lingkup nasional maupun internasional guna mencapai pengakuan baik dalam masyarakat dibawah yurisdiksi negara anggota, maupun pada lingkungan negara – negara anggota (United Nations, t.t.).

UDHR berisi 30 pasal yang diawali dengan pernyataan pasal 1 yang berbunyi “Semua manusia terlahir bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Manusia diberkahi akal sehat serta hati nurani dengan alasan dalam semangat persaudaraan.” Penekanan dalam HAM ini meliputi banyak aspek mulai dari larangan kesewenang-wenangan, penyiksaan atau perlakuan kejam, hingga larangan merendahkan martabat manusia. Dalam sebuah laporan mengenai UDHR pada abad ke-21, Gordon Brown (2016) menjabarkan bahwa UDHR bermaksud menawarkan dasar bersama, pemahaman bersama, dan standar umum untuk pencapaian semua orang dan bangsa yang tetap penting hingga abad ke-21 ini. Ketika orang memperdebatkan tentang HAM, pada dasarnya bentuk ketidaksetujuan dan argumen mereka pun merupakan aplikasi dari deklarasi tersebut yang mengenai kebebasan. Poin – poin yang terdapat dalam UDHR bersifat tegas, eksplisit, dan jelas ditetapkan untuk semua khalayak umum. Oleh karena itu, berdasarkan UDHR, negara sebagai entitas memiliki lima alasan utama dalam implementasinya menegakkan serta mempromosikan HAM. Pertama, negara bertanggung jawab inheren terhadap institusi tertentu, seperti sistem hukum yang membatasi HAM secara langsung. Kedua, negara memiliki tingkat kontrol atas

lembaga serta struktur lain mengenai batasan HAM. Ketiga, negara memiliki kekuatan atas hak penegakkan HAM lebih besar dalam masyarakat terhadap pelanggar. Keempat, sebaliknya, negara dapat menjadi ancaman utama dalam HAM. Kelima, negara dapat melakukan pembagian kekuasaan serta perlindungan utama terhadap ancaman. Dalam pandangan Tiongkok, poin pertama, kedua, ketiga serta kelima merupakan apa yang sedang diupayakan terhadap masyarakat Uyghur. Namun, media BBC serta kesaksian para mantan tahanan lebih memperlihatkan poin nomor empat, yakni negara menjadi ancaman utama dalam HAM pada masyarakat Uyghur di Xinjiang. Hal ini akan menjadi refleksi mengenai tuduhan serta apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Uyghur (Brown, 2016).

Negara bukan hanya diperlukan dalam hal efektivitas dan kontrol, melainkan juga termasuk klaim legitimasi yang membedakan masyarakat sah sebagai entitas negara dan lembaga lain yang beroperasi. Selanjutnya, rezim HAM yang dicetuskan oleh UDHR ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan sebagai dasar untuk perjanjian internasional lainnya hingga hukum dan konstitusi nasional. Hal ini didasari kewajiban negara untuk peduli terhadap HAM sampai dengan batas tertentu dan dengan empat pertimbangan penting yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan negara terkait HAM itu sendiri. Pertama yakni efek kebijakan dan tindakan negara pada negara lain. Kedua yaitu dampak dari kebijakannya terhadap negara – negara lain serta cara atau bentuk partisipasinya di lembaga internasional. Ketiga yakni pertimbangan sejauh mana kebijakan tersebut layak dikembangkan dan diimplementasi. Keempat yaitu pertimbangan respons mengenai pelanggaran hak di negara lain, baik melalui kritik atau penolakan publik atau upaya intervensi serta dukungan untuk intervensi (Brown, 2016). Lebih lanjut, terdapat tiga penyebab utama dari pelanggaran HAM, pertama adalah adanya rasa takut kehilangan kekuasaan atas kekuatan yang akan datang. Selanjutnya ialah adanya keserakahan karna harga diri. Terakhir yakni adanya kekuatan dan keinginan untuk memiliki wewenang atas bagian – bagian tertentu yang dalam konteks negara bisa berupa penyalahgunaan kekuasaan dan penyebaran rasa takut terhadap masyarakat (Brown, 2016).

1.4.2. Pendekatan Konstruktivisme terhadap Media Massa Global

Pendekatan konstruktivisme muncul pada 1980-an yang meyakini adanya peran individu yang telah terstrukturisasi (Steans et al, 2005: 183). Pendekatan konstruktivisme hadir sebagai via media yang menjembatani perspektif rasionalis dan reflektivisme. Jackson & Sorensen (1999) menjabarkan bahwa pendekatan konstruktivisme sering kali disebut sebagai *middle ground theory* dalam studi Hubungan Internasional. Seperti yang diketahui, sebelum kemunculan konstruktivisme, teori kritis dan pos modernisme membahas tentang dunia sebagai sesuatu yang bukan 'given', melainkan sesuatu yang terbentuk dari hasil konstruksi pikiran manusia. Hampir sama halnya dengan asumsi teori kritis dan pos-modernis, kaum konstruktivis meyakini bahwa dunia sosial kini ialah wilayah intersubjektif yang mana dunia sosial ialah sesuatu yang dianggap penting dalam kelangsungan hidupnya dan upaya memahaminya. Dunia sosial ini dibuat dan dibentuk pada waktu dan tempat tertentu oleh masyarakat.

Terdapat empat asumsi utama kaum konstruktivisme, pertama yaitu perubahan dalam masyarakat internasional yang sifatnya penting dan tak terelakkan. Kedua, norma dan budaya internasional ialah kedua hal yang wajib ditaati oleh semua aktor internasional, baik aktor negara dan non-negara. Ketiga, politik dan hubungan internasional pada akhirnya akan membentuk '*a world of our making*' bagi semua aktor internasional. Terakhir, aktor dalam sistem internasional pada dasarnya bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Asumsi – asumsi tersebut menghasilkan prinsip – prinsip para konstruktivis yang meyakini bahwa konstruksi sosial bersifat dinamis yang membutuhkan interaksi aktor negara dan aktor non-negara demi terciptanya '*a world of our making*' (Onuf, 1989 dalam Jackson & Sorensen, 1999). Selanjutnya, Onuf (1989) dalam Jackson & Sorensen, (1999) juga menjabarkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat politik dari lahir yang diimplementasikan dengan cara memberi pengaruh pada orang lain sehingga *international order* terbentuk. Dalam prosesnya, individu berkembang dan membentuk badan politik atau masyarakat politik yang terorganisir dengan sendirinya. Pada titik ini pula, para konstruktivis meyakini

bahwa aktor dan fenomena internasional terbentuk setelah adanya perkembangan dari suatu aktor lain.

Media sebagai aktor dalam hubungan internasional ditelaah dalam paham konstruktivis berawal dari perkembangan pada 1970-an hingga akhir 1980-an ketika aktor dalam hubungan internasional terbagi menjadi dua, yakni aktor negara dan non-negara. Aktor non-negara yang dimaksud adalah perusahaan multinasional dan aktor lain yang memegang peran penting dalam ekonomi politik internasional. Akan tetapi, posisi ini berubah pada 1980-an akhir ketika teori transnasional dan teori interdependen melihat adanya aktor-aktor multinasional sebagai aktor non negara di panggung internasional telah mengubah keseimbangan politik kekuasaan tradisional yang mengurangi dominansi aktor negara (Brown Ainley, 2009 dalam Coban, 2016: 46). Oleh karena itu, pada penghujung 1980-an ini, seiring dengan masuknya pos modernisme ke dalam studi Hubungan Internasional memperluas orientasi aktor dalam HI hingga muncul masyarakat internasional sebagai aktor dalam hubungan internasional yang dapat memperluas pengaruhnya lintas batas menggunakan teknologi komunikasi baru dan media massa (Coban, 2016).

Selanjutnya, terdapat dua bagian penting sebagai pelaku dalam konstruktivisme, yakni struktur dan agen (Steans & Pettiford, 2009). Struktur memperlihatkan bagaimana lingkungan sosial suatu negara membentuk identitas serta kepentingannya, layaknya peran norma internasional, organisasi dan institusi, serta kreasi norma juga penekanannya. Struktur dilihat sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi, namun tidak secara langsung menentukan. Disamping itu, agen memperlihatkan aktor negara dan non-negara yang selalu berkembang dan menjadi pemain dalam permasalahan global. Struktur dan agen ialah dua bagian yang saling melengkapi dan berjalan secara bersamaan sehingga dengan dinamika politik yang ada memunculkan norma sebagai pengatur yang menentukan peran aktor dalam dinamika hubungan internasional. Dalam membahas media massa sebagai aktor dalam hubungan internasional, kemudahan akses pada media massa untuk hal publikasi juga membuat lingkup pembaca tanpa batas wilayah atau negara lagi. Pekerjaan para jurnalis tidak hanya untuk mengumpulkan dan menyeleksi fakta, namun lebih dari itu membuat sebuah media massa profesional dapat berpartisipasi

dalam hubungan internasional. Kemampuan media massa ini menjadikannya selain menjadi pewarta, juga sebagai aktor dalam politik internasional (Rianto, 2008). Oleh karena itu, media massa dalam paham konstruktivis bisa berperan sebagai struktur yang kemudian secara implisit menentukan perkembangan agen.

Dalam paham konstruktivis, penyuaran dan bahasa dinilai penting dalam hubungan internasional karena ketika seseorang bersuara, akan ada pihak lain yang mendengar, ketika seseorang menulis atau tertulis, pasti akan ada orang yang melihat, bahkan ketika seseorang berbicara *worthlessly* atau membentuk gestur, pasti akan ada orang yang menyadari. Aksi tersebut disebut sebagai *identical consciousness* dan reaksi yang ada disebut sebagai *common sense* yang akhirnya dapat membuat Fenomena internasional (Onuf, 1989 dalam Jackson & Sorensen, 1999). Peran media massa juga seiring dengan kontribusi dari paham konstruktivis yang meliputi tiga poin penting. Pertama, pemaparan norma internasional, ide, nilai dan signifikansi dalam membentuk politik internasional. Kedua, konstruktivis menunjukkan probabilitas gagasan yang didukung oleh sifat politik internasional yang dinamis. Ketiga, paham konstruktivis yaitu membantu klarifikasi dan pemaparan dari dinamika internasional (Steans & Pettiford, 2009). Ketiga poin ketika diimplementasikan pada media massa nyatanya berjalan seiringan. Pertama, dengan kepentingan politik dari sebuah media yang dapat dievaluasi dengan berbagai cara. Pertama, media global pada dasarnya telah membentuk '*global village*' yang membuat media dapat melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana mereka melihat dirinya bahkan masyarakat lain. Kedua, proses media menyediakan informasi pada saat yang bersamaan mengedukasi masyarakat proses tentang dunia, sehingga pengaruh media massa dalam hubungan internasional ialah menggambarkan citra aktor-aktor internasional baik negara ataupun non-negara. Coban (2016) menjabarkan bahwa dalam konteks ini, media menjadi alat penting untuk mendefinisikan identitas 'in-group' terhadap 'out-group' berdasarkan apa yang direpresentasikannya dalam rangkaian kontras juga pertentangan suatu isu. Pada titik ini pula, sudut pandang orang terhadap citra internasional terbentuk dan secara berkelanjutan membentuk realitas politik internasional.

1.4.2.1 *Agenda Setting* dalam Pembentukan Opini Publik

Teori *agenda setting* dijelaskan oleh McQuail dalam Naveh (2002) melalui sebuah ilustrasi dari adanya debat yang terjadi dalam publik atau masyarakat terkait dengan pemberitaan suatu isu oleh media yang mengandung kepentingan atau agenda tertentu. *Agenda setting* disebut sebagai kemampuan media massa untuk mempengaruhi arah dan intensitas pemberitaan (McCombs & Shaw, 1968). Disisi lain, kajian mengenai *agenda setting* kemudian dikembangkan oleh Lazarsfeld dan Merton (1971) yang menjabarkan bahwa salah satu fungsi media massa ialah melakukan perundingan terhadap isu-isu publik, organisasi, ataupun status sosial yang dapat mendapat perhatian publik. Untuk menginvestigasi efek dari *agenda setting*, terdapat dua metode utama. Metode pertama meliputi pemanfaatan data dan analisis melalui pemberitaan bertingkat dan berkelanjutan dari awal mula isu tersebut muncul hingga memuncak dan terbentuk pemetaan peristiwa penting untuk diteliti sesuai *agenda setting*. Sedangkan metode kedua dapat diaplikasikan dengan penyelidikan lebih dalam terkait sebuah isu-isu kemanusiaan yang berdampak signifikan dan mempertimbangkan kembali *concern* dalam isu tersebut.

Menurut Dorman & Livingston (1994), dalam modifikasinya terkait teori *agenda setting* karya McCombs, terdapat dua sistem pengaturan dalam tahap aplikasi *agenda setting*, yakni sistem pengaturan *priming* dan *framing*. *Priming* ialah aplikasi *agenda setting* dimana media massa mampu membangun sebuah perspektif atas suatu isu dengan sebuah arti penting secara implisit. Secara spesifik, *priming* menjelaskan sebuah isu dengan arti penting dalam sebuah media. Disamping *priming*, terdapat pula *framing*. *Framing* menjelaskan tentang pemilihan berita serta bagaimana *agenda setting* sebuah media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu. Hal tersebut kemudian dapat ditelaah dengan melihat sebuah isu diberitakan. Adanya *agenda setting* berpengaruh besar terhadap *framing* sebagai proses media membuat sebuah pencitraan dari proses penyaringan sebuah berita. Pada akhirnya, implementasi dari *agenda setting* ini memengaruhi opini publik yang pada suatu kondisi tertentu dapat memaksa pemerintah untuk merespons opini yang terbentuk tersebut.

Setelah *agenda setting*, media sering kali berhubungan dengan opini publik, baik dalam penyampaian aspirasi, maupun pemberitaan yang menghasilkan opini publik. Bahkan lebih jauh, peran media dalam ini memiliki peran sebagai *agenda setting* yang dapat menggiring opini serta memengaruhi pemerintah sehingga lahir kebijakan luar negeri. Lebih lanjut, Opini publik dinilai penting karena dilihat sebagai kesamaan pandangan suatu masyarakat yang tidak dapat diabaikan oleh negara, sedangkan media dinilai penting karena dalam memainkan perannya, media bertindak sebagai jurnalis independen, oleh karena itu, media mampu memberikan pengaruhnya sehingga dapat menyatukan pandangan antara publik dan pemerintah (Mermin dalam Neack, 2008).

Opini publik yang mendapat afirmasi pada akhirnya akan menjadi bahan pemerintah untuk bertindak atau merumuskan suatu kebijakannya. Disamping itu, hubungannya dengan media dapat dilihat ketika media disebut juga sebagai pisau bermata dua, hal tersebut dikarenakan kekuatan media yang berperan baik sebagai wadah bagi masyarakat menyalurkan opini publik, maupun untuk menjalankan peran yang lebih kompleks atas apa yang dituliskannya sehingga berpotensi melahirkan isu baru yang berpengaruh terhadap suatu negara (Naveh, 2002). Peranan media ini juga di satu sisi dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mengontrol isu, akan tetapi, sebaliknya media pada era digital kini juga dapat mendikte opini publik yang terbentuk sesuai dengan kepentingannya untuk kemudian mempengaruhi pemerintah.

1.4.3. Citra Internasional

Terdapat hubungan histori dan politik dalam dalam teori citra internasional. Menurut Williams (2018), perhatian terhadap citra sebuah aktor dalam hubungan internasional menjadi salah satu inti dari politik global setelah Perang Dingin ketika hubungan internasional berkembang. Revolusi dalam studi politik internasional pada 1970-80an menyadarkan bahwa kemunculan pendekatan konstruktivisme dan fokusnya terhadap citra dan persepsi sangat berguna bagi aktor internasional. Jervis (1976) menjabarkan bahwa citra dari persepsi para aktor internasional sering menjadi penting, bahkan lebih penting daripada realitas objektif dalam sistem internasional. Hal ini didasari bahwa kekuatan sebagai salah satu elemen dalam

hubungan internasional sebenarnya dipengaruhi oleh persepsi. Selanjutnya hubungan citra internasional diperjelas dengan adanya hubungan antara kepentingan dan aktor dalam hubungan internasional yang terbentuk oleh citra melalui bagaimana informasi mengenai aktor dan kepentingan tersebut dilihat (State University of New York, 2008).

Citra ialah hal yang penting dalam era politik kontemporer, begitu juga citra internasional sebuah aktor dalam hubungan internasional. Pasalnya, masyarakat internasional lebih banyak menerima informasi dan kesannya mengenai politik melalui media yang dipenuhi pencitraan subjek yang ada dalam konten beritanya. Seiring dengan “citra internasional” menjadi hal penting yang perlu dijaga oleh aktor internasional, para pemimpin politik perlu meningkatkan keterampilannya untuk menggabungkan budaya populer dan kekuatan politik. Hal ini didasari pula oleh estetika politik global yang berdinamika dan terus berkembang sehingga citra para aktor internasional lebih mudah diruntuhkan oleh banyak faktor (Williams, 2018). Kepentingan citra internasional ini pada akhirnya berhubungan dengan opini publik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.

1.5. Hipotesis

BBC sebagai media massa global mempengaruhi citra internasional Tiongkok melalui *priming* dan *framing* pemberitaannya mengenai isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat etnis Uyghur secara berkelanjutan sejak 2015.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni dapat dilihat dari bidang teori dan bidang praktisi. Dari bidang teori, adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas studi mengenai bagaimana peran media massa kini dapat mempengaruhi citra suatu negara dalam lingkup internasional. Dari sisi praktisi, cara BBC mempengaruhi citra internasional Tiongkok melalui isu HAM dalam masyarakat etnis Uyghur dapat menjadi suatu faktor yang perlu dipertimbangkan aktor – aktor internasional lainnya baik negara maupun masyarakat internasional agar lebih kritis terhadap pengaruh media massa dalam suatu isu.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1. Media Massa Global

Media massa global merupakan beragam teknologi media yang dimaksudkan untuk menjangkau khalayak luas dengan komunikasi massa pada lingkup global (Science Daily, t.t.). Media massa juga turut berkembang hingga dapat berpartisipasi dalam hubungan internasional terutama ketika kemunculan aktor – aktor negara baru diantara tahun 1970 hingga 1980-an. Rianto (2008) menjabarkan bahwa kemampuan media massa pada era global ini tidak hanya menjadikannya sebagai pewarta namun juga sebagai aktor dalam politik internasional. Kemampuan media untuk mengedukasi dan menyalurkan informasi dapat mengarahkan opini masyarakat internasional. terdapat empat inti penting yang dilakukan media massa menurut McQuail (1987), pertama yakni media massa melakukan kegiatannya dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat secara bebas, sukarela, umum, dan murah. Kedua, media massa berfungsi menjadi pengantar segala macam pengetahuan daripada institusi lainnya. Ketiga, terdapat hubungan pengirim dan penerima dalam interaksi komunikasi massa didalamnya. Keempat yaitu media kini menjangkau masyarakat lebih banyak dan lebih cepat dibanding institusi lainnya seperti peranan sekolah, orang tua, dll. Selanjutnya McQuail (1987) juga berasumsi bahwa media massa dapat dipahami sebagai sebuah kekuatan atau alat kontrol, manajemen, serta inovasi dalam suatu masyarakat. Hal ini diperkuat dengan asumsi selanjutnya bahwa media massa telah menjadi sumber dominan bagi masyarakat untuk mencari informasi.

Dalam konteks penelitian ini, media massa yang dimaksud sebagai aktor internasional adalah BBC. Sebagai penyiar tertua di dunia dengan media massa dengan pegawai terbanyak, BBC telah menggeser peranan aktor – aktor internasional, terutama dalam isu – isu khusus yang ingin di *highlight* nya untuk mencapai suatu tujuan. Hills & Michalis (2000) menjabarkan bahwa BBC memusatkan fokusnya pada kombinasi interaktivitas, *branding*, serta konten untuk menjadi merek global. Dalam era digital ini, internet berada sebagai sebuah pusat

misi baru para aktor internasional, salah satunya ialah BBC dalam isu HAM etnis Uyghur yang ditangani oleh Tiongkok. BBC sebagai media massa global dinilai sebagai media terpercaya di A.S. yang dibuktikan oleh survey dari Reuters Institute. Disamping itu, BBC telah menjadi *News Brand of The Year* menurut Hariss Poll pada 2018, *TV's Most Trusted News Brand* dalam studi MediaPost dan Brand Keys. Pada 2019, menurut globalwebindex sebuah lembaga survey global membuktikan bahwa BBC News menjadi *World's most trustworthy news service* (BBC Media Centre, 2020). Hal ini juga menjadi alasan mengapa Penulis menjadikan BBC sebagai subjek utama. Penjelasan mengenai upayamedia massa BBC selanjutnya akan dijelaskan oleh peneliti dalam bab – bab selanjutnya untuk membuktikan hipotesis yang telah dijabarkan.

1.7.1.2. Citra Internasional

Beralih abad ke-21, media global menjadi fitur penting yang kemudian dapat berpengaruh dalam komunikasi massa hingga melahirkan opini publik yang menampilkan suatu citra aktor internasional. Dalam penelitian ini, citra internasional yang dimaksud merujuk pada citra Tiongkok pada tatanan internasional yang dipengaruhi keberadaan media massa global BBC dalam pemberitaannya terkait isu HAM etnis Uyghur. Terbentuknya citra internasional Tiongkok ini kemudian akan penulis jelaskan di bab – bab selanjutnya melalui analisis media sebagai subjek utama.

1.7.1.3. Priming dalam Agenda Setting

Fiske dan Taylor (1991) menjabarkan bahwa *priming* menggambarkan efek dari konten untuk memunculkan ide – ide baru yang memang sengaja ditonjolkan untuk membangun perspektif. *Priming* memengaruhi perhatian yang secara langsung maupun tidak dapat mengabaikan masalah lain. *Priming* juga membuat individu atau masyarakat akhirnya mempertimbangkan penilaiannya terhadap sesuatu yang ditunjukkan oleh media hingga akhirnya membentuk opini publik (Mueller, 1994). Pada akhirnya, *priming* dinilai berhasil ketika efek ini mempengaruhi suatu kepentingan dengan pertimbangan tertentu. Dalam *priming*,

terdapat model aksesibilitas yang menjabarkan bahwa proses *priming* ini sebagiannya merupakan proses yang sifatnya konstruktif terhadap opini publik (Tourangeau, et al., 1988). Hal tersebut didasari bahwa individu tidak dapat mempertimbangkan apa yang mereka ketahui atau yakini mengenai suatu isu tertentu, sikap mereka pada akhirnya menjadi produk yang diolah oleh media untuk meyakinkan konten yang dibuatnya mengenai suatu isu atau masalah. Dengan pengulangan berulang dari satu berita ke berita lain yang berkesinambungan, pembaca akan mulai terbangun atau terkonstruksi atas perspektif atau ide – ide dari *agenda setting* media terkait. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *priming* merupakan dampak dari stimulus yang sudah ada sebelumnya, yakni isi dari media (Roskos-Ewoldsen et al., 2007:53). Asumsi atas teori ini ialah memanfaatkan orang yang tidak mengelaborasi pengetahuan mengenai suatu persoalan dan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang diketahuinya sehingga dengan stimulus pengulangan di berita (Alger, 1989: 127). Dalam konteks media, *priming* berdampak pada perilaku atau penilaian khalayak yang muncul kemudian, seperti dukungan atau malah penolakan.

Dalam konteks penelitian ini, *priming* merupakan salah satu upaya BBC sebagai media massa global untuk meyakinkan masyarakat internasional terlebih membentuk persepsi agar opini publik terbentuk terhadap Tiongkok dalam isu HAM etnis Uyghur yang secara rinci akan dijelaskan pada bab selanjutnya untuk memperkuat argumen dari hipotesis peneliti. Seluruh berita BBC dengan total 31 Berita di segala platform berita BBC (Situs Daring, Radio *Podcast*, dan TV) akan menjadi acuan Peneliti untuk menganalisis *priming* yang dilakukan oleh BBC

1.7.1.4. Framing dalam Agenda Setting

Framing adalah proses dimana sumber komunikasi membangun serta mendefinisikan suatu isu sosial atau politik untuk audiensinya (Nelson, et Al., 1997). *framing* ialah memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan serta membuat aspek tersebut lebih menonjol dalam teks yang berkomunikasi, sedemikian rupa dibentuk untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, membuat interpretasi kausal, evaluasi moral, atau bertujuan untuk

merekomendasikan hal yang ingin dijelaskan. Penelitian mengenai *framing* terhadap suatu isu pada dasarnya berhubungan dengan studi tentang efek konten komunikasi terhadap pendapat Kinder & Sanders (1990). Konsep *framing* sendiri biasanya digunakan dalam komunikasi politik sebagai proses penggambaran dari sebuah sumber (surat kabar, berita televisi, atau individu) mendefinisikan isu penting yang mendasari masalah sosial atau politik tertentu, serta menguraikan suatu serangkaian pertimbangan yang relevan dengan masalah tersebut. Hal ini diperjelas oleh Gamson dan Modigliani (1989) bahwa sebuah *framing* ialah ide pengorganisasian utama atau sentral untuk memahami peristiwa yang relevan dan membentuk pengertian mengenai masalah. Disamping itu, Entman & Rojecki (1993) menyebutkan bahwa Terdapat perbedaan utama antara *priming* dan *framing*, hal tersebut yakni gagasan baru. Efek dari *priming* dan *framing* dapat terjadi secara bersamaan. Dalam ranah media massa, contohnya yakni pemingkalian situasi atau isu yang diberitakan oleh sebuah media menggunakan informasi yang baru diperoleh juga berbasis sejarah dengan penekanan tertentu. Ghanem (1997: 3) menjabarkan bahwa *framing* dalam *agenda setting* membuat pembaca tidak hanya mengenai apa yang dipikirkan, namun juga bagaimana cara memikirkannya.

Merujuk pada definisi dan konsep mengenai *framing*, dalam penelitian ini, *framing* yang dimaksud ialah upaya media BBC dalam menyetel agenda dengan melakukan penekanan – penekanan tertentu, seperti kata – kata ‘Muslim’ dan ‘Islami’. Dengan adanya penekanan dalam pemberitaan tersebut, peneliti secara lebih lanjut akan menjelaskan proses dan upaya *framing* ini dalam bab selanjutnya terkait analisis pemberitaan BBC mengenai penanganan isu etnis Uyghur oleh pemerintah Tiongkok guna menguji hipotesis.

1.7.1.5. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM ialah situasi ketika hak asasi manusia yang tercatat dalam Universal Declaration of Human Rights tidak tercapai. Sebelum membahas mengenai pelanggaran, HAM tersebut juga perlu dimaknai agar maksud dari pelanggaran HAM sendiri dapat dipahami. Hak Asasi Manusia menurut PBB adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis

kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. HAM ini meliputi hak hidup dan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud termasuk dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat, berekspresi, hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan, dan hak – hak dalam aspek lain seperti aspek eksosbud ataupun aspek sipil dan politik (United Nations, t.t.). HAM ini berlaku pada setiap manusia tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, majelis umum PBB menyatakan bahwa UDHR adalah standar umum pencapaian yang harus dilakukan oleh semua bangsa dari tingkat individu hingga kelompok masyarakat dalam menegakkan HAM. UDHR ini juga perlu dilakukan guna mempromosikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia dengan langkah – langkah progresif sebagai bentuk ketaatan universal antar masyarakat dalam lingkup masyarakat regional hingga masyarakat yang dibawah oleh yurisdiksi internasional (United Nations, t.t.)

Menurut Human Rights Watch (2014) kepala negara wajib melindungi dan mempromosikan HAM agar ditegakkan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelanggaran HAM dapat terjadi apabila suatu negara gagal bertindak terhadap salah satu lapisan masyarakat, seperti contoh kecil yakni kekerasan rumah tangga yang terjadi pada tingkat kelompok kecil. Pelanggaran HAM ialah satu penyebab utama dari segala bentuk ketidakamanan dan ketidakstabilan. Hal itu dapat berupa kegagalan untuk memastikan tata kelola yang baik, aturan hukum yang adil, keadilan sosial, hingga pembangunan inklusif yang dapat memicu konflik (Pillay, 2014). Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran HAM yang dimaksud akan dipaparkan lebih jelas setelah peneliti menganalisis penanganan Tiongkok dalam isu Uyghur ini sesuai berita BBC yang dilihat berdasarkan pasal – pasal yang tercantum dalam UDHR.

1.7.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis bersifat eksplanatif yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat. Pada penelitian ini, variabel dependen citra internasional Tiongkok dan Variabel Independennya yakni pemberitaan BBC mengenai isu HAM etnis Uyghur di

Xinjiang, Tiongkok dalam penelitian yang didasari rumusan masalah serta berpedoman pada kerangka pemikiran untuk menguji hipotesis (Singarimbun & Effendi, 2003).

1.7.3. Teknik Analisis Data

Peneliti memilih menggunakan metode analisis data kualitatif dengan fokus terhadap objek penelitian yang bertahap. Dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, serta pengurutan sumber data untuk menemukan benang merah antar data yang membantu peneliti mendapat pola tertentu untuk menjawab rumusan masalah sekaligus menguji hipotesis (Leng, 2002). Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknis analisis data yang akan digunakan ialah pengumpulan berita BBC terkait penanganan Tiongkok terhadap isu HAM di Uyghur serta dokumen pendukung lain yang terkait dengan topik tulisan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis pada penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini terdiri dari pengumpulan data sekunder dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, buku, media cetak, media daring, dokumen pemerintah, arsip resmi, hingga hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Setelah data tersebut terkumpul peneliti akan melakukan penyusunan agar data sekunder tersebut menjadi pola – pola empirik dengan metode positivis secara objektif terhadap fakta – fakta yang ada (Bhattacharjee, 2012). Selain itu, metode interpretatif kemudian dilakukan untuk membantu peneliti meneliti dengan valid melalui perspektif tertentu serta melihat fenomena dari peristiwa – peristiwa yang telah terjadi.

1.7.5. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini diambil mulai dari tahun 2014 hingga 2019. Rentang waktu ini diambil berdasarkan urutan pemberitaan BBC pada 2014 mengenai isu awal mengenai Uyghur dan kebijakan Tiongkok yang dilansir dari

media pemerintah Tiongkok hingga peralihan BBC mewartakan isu HAM Uyghur secara independen pada 2015 dan kenaikan intensitas pewartaan BBC mengenai isu HAM Uyghur hingga 2019. Namun, perlu diketahui bahwa penelitian ini masih berkemungkinan menyajikan data sebelum tahun 2014 karena pentingnya penjelasan mengenai *overview* terkait situasi dan kondisi sebelum isu HAM etnis Uyghur muncul.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Penulis akan menjabarkan penelitian yang dalam lima bab secara komprehensif.

- BAB I: Berisikan latar belakang masalah yang akan membantu maksud dari rumusan masalah selanjutnya, kemudian rumusan masalah disangga dengan tinjauan literatur, kerangka teori untuk membuat pemikiran sintesis serta menghasilkan hipotesis dibantu dengan metodologi penelitian.
- BAB II: Menelaah tentang penjelasan mengenai arti penting Xinjiang bagi Tiongkok serta dinamika Pemerintah Tiongkok dengan etnis Uyghur
- BAB III: Menjelaskan tentang media BBC dan pemberitaannya terhadap Tiongkok sebelum isu Uyghur dan ketika merebaknya isu Uyghur, serta respons dari Tiongkok dan masyarakat internasional terkait pemberitaan BBC mengenai isu HAM Uyghur.
- BAB IV: Menjelaskan tentang proses serta analisis BBC melakukan *agenda setting* serta pembentukan opini publik mengenai citra Tiongkok di tatanan Internasional dalam isu HAM etnis Uyghur berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan
- BAB V: Menjabarkan kesimpulan yang menegaskan argumentasi penelitian berdasarkan temuan data dalam bab pembahasan serta poin – poin riset lebih lanjut